

Penguatan Tata Kelola dan Transparansi Keuangan pada Koperasi Merah Putih Melalui Pendampingan Penyusunan SOP dan Pelaporan Keuangan

Hilmi^{✉1}, Wahyuddin², Sri Mulyati³, Muammar Khadafi⁴

^{1,2,3,4}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Malikussaleh, Aceh, Indonesia

✉Corresponding Author: hilmi@unimal.ac.id

Abstrak

Koperasi Merah Putih merupakan salah satu program strategis pemerintah dalam memperkuat ekonomi masyarakat melalui pengembangan kelembagaan koperasi yang profesional, transparan, dan akuntabel. Namun, dalam implementasinya masih dijumpai berbagai kendala, antara lain belum tersusunnya Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan keuangan, sistem pencatatan transaksi yang belum terstandarisasi, serta keterbatasan kemampuan pengurus dalam menyusun laporan keuangan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memperkuat tata kelola dan transparansi keuangan pada Koperasi Merah Putih di Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe melalui pendampingan penyusunan SOP dan pelaporan keuangan. Metode yang digunakan adalah pendekatan *Participatory Action Learning* (PAL) yang meliputi tahap observasi, identifikasi permasalahan, pelatihan, pendampingan, dan evaluasi. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman pengurus mengenai prinsip tata kelola koperasi, transparansi keuangan, penyusunan SOP, serta penyusunan laporan keuangan. Selain itu, kegiatan ini menghasilkan dokumen SOP pengelolaan keuangan, format pencatatan transaksi, dan format pelaporan keuangan yang dapat digunakan sebagai pedoman operasional koperasi. Pendampingan yang dilakukan memberikan manfaat dalam meningkatkan kapasitas pengurus, memperkuat sistem administrasi dan pengendalian internal, serta mendorong penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan koperasi. Kegiatan ini diharapkan menjadi model pendampingan yang dapat direplikasi pada Koperasi Merah Putih di wilayah lain untuk mendukung keberlanjutan kelembagaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: Koperasi Merah Putih, Tata Kelola Koperasi, Transparansi Keuangan, Akuntabilitas, Pengabdian Masyarakat

Pendahuluan

Koperasi merupakan salah satu pilar penting dalam sistem perekonomian nasional Indonesia yang berlandaskan asas kekeluargaan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Anjali & Riofita, 2026). Sebagai badan usaha yang dimiliki dan dikelola oleh anggota, koperasi berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan aktivitas ekonomi berbasis partisipasi, pemerataan pendapatan, serta pemberdayaan usaha produktif. Dalam konteks pembangunan nasional, koperasi juga menjadi instrumen strategis dalam memperkuat ekonomi kerakyatan, terutama di tingkat desa dan kelurahan, sehingga keberadaannya diharapkan mampu meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat secara berkelanjutan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, 1992).

Komitmen pemerintah dalam memperkuat peran koperasi semakin nyata melalui diterbitkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Kebijakan ini menargetkan percepatan pembentukan dan pengembangan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai salah satu strategi pembangunan ekonomi berbasis desa yang mendukung swasembada pangan, pemerataan ekonomi, dan pencapaian visi Indonesia Emas 2045 (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, 2025). Melalui kebijakan tersebut, pemerintah tidak hanya berfokus pada pembentukan koperasi sebagai badan hukum, tetapi juga menekankan pentingnya penguatan tata kelola organisasi, pengembangan model bisnis, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta sistem pengelolaan keuangan yang profesional agar koperasi mampu berkembang secara berkelanjutan.

Sebagai tindak lanjut dari kebijakan tersebut, Peraturan Menteri Koperasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pengembangan Usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mengatur bahwa pengembangan koperasi harus didukung oleh sistem tata kelola yang baik, model bisnis yang adaptif, sistem informasi manajemen, pembinaan, pemantauan, serta evaluasi yang berkelanjutan (Peraturan Menteri Koperasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pengembangan Usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, 2025). Regulasi ini menunjukkan bahwa keberhasilan Koperasi Merah Putih tidak hanya diukur dari jumlah koperasi yang terbentuk, tetapi juga dari kualitas pengelolaan organisasi dan kemampuan pengurus dalam menjalankan fungsi manajerial secara efektif.

Tata kelola organisasi (*Good Cooperative Governance*) merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan koperasi (Azzahara, 2025; Syahban et al., 2025). Penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan akan menciptakan sistem organisasi yang profesional, meningkatkan efektivitas

pengambilan keputusan, memperkuat pengendalian internal, serta meningkatkan kepercayaan anggota terhadap pengurus. Sebaliknya, lemahnya tata kelola organisasi dapat menimbulkan berbagai permasalahan seperti ketidakjelasan pembagian tugas, lemahnya sistem administrasi, rendahnya kualitas pelayanan, hingga meningkatnya risiko penyalahgunaan kewenangan yang pada akhirnya menghambat perkembangan koperasi (Chandra, 2019; Muharram & others, 2023).

Salah satu aspek yang sangat menentukan keberhasilan penerapan tata kelola koperasi adalah transparansi pengelolaan keuangan (Goo & Sanda, 2022). Transparansi keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban pengurus kepada anggota melalui penyediaan informasi keuangan yang akurat, mudah dipahami, dan disampaikan secara berkala. Sistem pelaporan keuangan yang baik tidak hanya berfungsi sebagai alat pertanggungjawaban, tetapi juga menjadi dasar dalam pengambilan keputusan, penyusunan strategi usaha, evaluasi kinerja organisasi, serta peningkatan kepercayaan anggota terhadap koperasi. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan yang transparan harus didukung oleh sistem pencatatan yang tertib, prosedur kerja yang jelas, serta mekanisme pengendalian internal yang memadai (Indonesia, 2024).

Dalam mendukung tata kelola organisasi yang baik, keberadaan Standar Operasional Prosedur (SOP) memiliki peran penting sebagai pedoman pelaksanaan seluruh aktivitas operasional koperasi (P. I. A. Putri, 2025). SOP mengatur mekanisme penerimaan kas, pengeluaran kas, pencatatan transaksi, proses otorisasi, hingga penyusunan laporan keuangan sehingga setiap kegiatan dapat dilaksanakan secara konsisten, efektif, dan akuntabel. Selain meningkatkan efisiensi administrasi, penerapan SOP juga memperkuat sistem pengendalian internal dan meminimalkan potensi kesalahan pencatatan maupun penyalahgunaan dana koperasi (Mulyadi, 2019).

Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe merupakan salah satu wilayah yang memiliki aktivitas ekonomi masyarakat yang berkembang melalui sektor perdagangan, jasa, usaha mikro, dan berbagai kegiatan ekonomi produktif lainnya. Pembentukan Koperasi Merah Putih di wilayah ini diharapkan mampu menjadi sarana penguatan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan usaha secara kolektif dan profesional. Namun, berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan oleh tim pengabdian, masih ditemukan beberapa kendala dalam pengelolaan koperasi, antara lain belum tersusunnya Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan keuangan, pencatatan transaksi yang belum terstandarisasi, belum adanya pemisahan fungsi otorisasi dan pencatatan transaksi, serta belum tersusunnya laporan keuangan yang sistematis dan mudah dipahami oleh anggota. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kapasitas kelembagaan koperasi masih perlu diperkuat agar mampu mendukung implementasi tata kelola organisasi yang profesional dan akuntabel.

Apabila kondisi tersebut tidak segera ditangani, maka akan berpotensi menghambat perkembangan koperasi, menurunkan tingkat kepercayaan anggota, serta mengurangi efektivitas pengelolaan organisasi dalam jangka panjang. Oleh karena itu, diperlukan suatu program pendampingan yang tidak hanya memberikan pemahaman teoritis mengenai tata kelola koperasi, tetapi juga menghasilkan perangkat operasional yang dapat langsung diterapkan oleh pengurus dalam menjalankan aktivitas organisasi sehari-hari. Pendekatan pendampingan dipilih karena memberikan kesempatan kepada peserta untuk belajar melalui praktik langsung sehingga proses transfer pengetahuan berlangsung lebih efektif.

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memperkuat tata kelola dan transparansi keuangan pada Koperasi Merah Putih di Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe melalui pendampingan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan pelaporan keuangan. Luaran yang diharapkan meliputi tersusunnya SOP pengelolaan keuangan, meningkatnya kapasitas pengurus dalam menerapkan prinsip tata kelola koperasi yang baik, tersedianya format pelaporan keuangan yang lebih sistematis, serta meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan koperasi sehingga mampu mendukung keberlanjutan kelembagaan dan peningkatan kesejahteraan anggota.

Metode Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada Koperasi Merah Putih yang berlokasi di Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh. Kegiatan dilaksanakan pada tahun 2026 dengan sasaran utama pengurus dan anggota aktif koperasi yang terlibat dalam pengelolaan administrasi dan keuangan. Peserta dipilih secara purposive berdasarkan keterlibatannya dalam aktivitas operasional koperasi sehingga materi yang diberikan dapat langsung diterapkan dalam pengelolaan organisasi (Apriansyah et al., 2023; Hasibuan, Sayuti, et al., 2023; Hasibuan, Ardan, et al., 2023).

Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan *Participatory Action Learning* (PAL) yang mengintegrasikan kegiatan pelatihan, pendampingan, praktik langsung, dan evaluasi secara partisipatif. Pendekatan ini menempatkan peserta sebagai subjek utama dalam proses pembelajaran sehingga setiap tahapan kegiatan tidak hanya berorientasi pada peningkatan pengetahuan, tetapi juga pada penguatan keterampilan dan kemampuan peserta dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi koperasi. Melalui pendekatan tersebut, peserta dilibatkan secara aktif dalam proses identifikasi masalah, penyusunan solusi, implementasi SOP, hingga evaluasi hasil kegiatan (Hasibuan, Siregar, et al., 2024; Putri et al., 2022; Hasibuan, Verawaty Siregar, et al., 2024).

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui lima tahapan utama, yaitu observasi awal, identifikasi permasalahan, pelatihan, pendampingan praktik, dan evaluasi. Setiap tahapan dirancang secara sistematis untuk memastikan bahwa solusi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan mitra serta dapat diimplementasikan secara berkelanjutan.

Observasi Awal

Tahap observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi eksisting tata kelola Koperasi Merah

Putih. Kegiatan ini dilakukan melalui wawancara dengan pengurus koperasi, observasi terhadap proses administrasi dan pengelolaan keuangan, serta telaah terhadap dokumen yang telah dimiliki koperasi. Hasil observasi digunakan sebagai dasar dalam mengidentifikasi kebutuhan pendampingan dan menyusun materi pelatihan (Hasibuan, Siregar, Candrasari, et al., 2024).

Identifikasi Permasalahan

Data hasil observasi dianalisis untuk mengidentifikasi permasalahan utama yang dihadapi mitra. Permasalahan yang ditemukan meliputi belum tersusunnya SOP pengelolaan keuangan, pencatatan transaksi yang belum terstandarisasi, belum adanya pemisahan fungsi otorisasi dan pencatatan transaksi, serta belum tersedianya laporan keuangan yang sistematis dan mudah dipahami oleh anggota koperasi. Hasil identifikasi tersebut menjadi dasar dalam penyusunan program pendampingan (Feron et al., 2024).

Pelatihan dan Pendampingan

Tahap pelatihan dilaksanakan melalui penyampaian materi mengenai prinsip *Good Cooperative Governance*, transparansi dan akuntabilitas keuangan, sistem pengendalian internal, penyusunan SOP, serta penyusunan laporan keuangan koperasi. Setelah penyampaian materi, peserta mengikuti sesi praktik penyusunan SOP penerimaan kas, SOP pengeluaran kas, SOP pencatatan transaksi, dan format laporan keuangan dengan bimbingan langsung dari tim pengabdian. Pendampingan dilakukan secara intensif agar setiap peserta mampu memahami dan menerapkan materi sesuai dengan kondisi koperasi.

Evaluasi

Evaluasi dilakukan untuk mengukur efektivitas pelaksanaan kegiatan. Evaluasi mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan peserta dalam menyusun dokumen tata kelola koperasi. Pengukuran dilakukan melalui pre-test dan post-test, observasi selama praktik pendampingan, serta penilaian terhadap dokumen SOP dan format laporan keuangan yang berhasil disusun. Selain itu, dilakukan diskusi reflektif bersama peserta untuk memperoleh masukan mengenai manfaat kegiatan dan kebutuhan pendampingan lanjutan.

Keberhasilan kegiatan diukur berdasarkan beberapa indikator, yaitu meningkatnya pemahaman peserta mengenai tata kelola koperasi dan transparansi keuangan, tersusunnya SOP pengelolaan keuangan, tersedianya format pelaporan keuangan yang lebih sistematis, serta meningkatnya kemampuan peserta dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola koperasi yang baik dalam aktivitas operasional sehari-hari.

Tabel 1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian

Tahapan	Aktivitas	Luaran
Observasi awal	Wawancara, observasi, telaah dokumen	Identifikasi kondisi awal koperasi
Identifikasi masalah	Analisis kebutuhan mitra	Peta permasalahan tata kelola dan keuangan
Pelatihan	Penyampaian materi <i>Good Cooperative Governance</i> , transparansi keuangan, SOP, dan pelaporan keuangan	Peningkatan pengetahuan peserta
Pendampingan praktik	Penyusunan SOP, format laporan keuangan, dan simulasi pencatatan transaksi	Draft SOP dan format pelaporan keuangan
Evaluasi	Pre-test, post-test, observasi, dan diskusi	Evaluasi peningkatan kompetensi peserta dan rekomendasi tindak lanjut

Solusi Yang Ditawarkan

Berdasarkan hasil observasi awal dan identifikasi kebutuhan mitra, diketahui bahwa Koperasi Merah Putih di Kecamatan Muara Dua masih menghadapi berbagai kendala dalam aspek tata kelola organisasi dan pengelolaan keuangan. Permasalahan tersebut meliputi belum tersusunnya Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan operasional, sistem pencatatan transaksi yang belum terstandarisasi, rendahnya pemahaman pengurus mengenai prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta belum tersedianya format pelaporan keuangan yang sistematis. Kondisi tersebut berpotensi menghambat efektivitas pengelolaan koperasi serta menurunkan tingkat kepercayaan anggota terhadap pengurus.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, tim pengabdian menawarkan serangkaian solusi yang disusun berdasarkan prinsip *Good Cooperative Governance* dengan pendekatan partisipatif. Solusi yang diberikan tidak hanya berorientasi pada peningkatan pengetahuan, tetapi juga menghasilkan perangkat tata kelola yang dapat langsung diterapkan dalam aktivitas operasional koperasi.

Solusi pertama adalah pendampingan penyusunan SOP pengelolaan keuangan. Kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan pedoman kerja yang mengatur mekanisme penerimaan kas, pengeluaran kas, pencatatan transaksi, proses otorisasi, serta penyusunan laporan keuangan. Dengan adanya SOP, setiap aktivitas operasional koperasi diharapkan dapat dilaksanakan secara konsisten, tertib, dan sesuai dengan prinsip akuntabilitas.

Solusi kedua berupa pelatihan tata kelola koperasi dan transparansi keuangan. Materi pelatihan mencakup konsep *Good Cooperative Governance*, pentingnya transparansi dan akuntabilitas, pengendalian internal, serta peran laporan keuangan dalam mendukung pengambilan keputusan organisasi. Melalui pelatihan ini, pengurus diharapkan memiliki

pemahaman yang lebih baik mengenai pengelolaan koperasi yang profesional dan berkelanjutan.

Solusi ketiga adalah pendampingan penyusunan sistem pencatatan transaksi dan pelaporan keuangan. Pengurus diberikan bimbingan dalam menyusun format pencatatan transaksi yang sederhana, sistematis, dan mudah diterapkan sesuai dengan kebutuhan koperasi. Selain itu, peserta juga didampingi dalam menyusun format laporan keuangan yang mampu menyajikan informasi secara lebih transparan dan mudah dipahami oleh anggota.

Solusi keempat berupa penguatan sistem pengendalian internal melalui pembagian fungsi dan tanggung jawab dalam proses administrasi keuangan. Pendampingan ini bertujuan untuk mengurangi risiko kesalahan pencatatan, meningkatkan ketertiban administrasi, serta memperkuat mekanisme pengawasan terhadap pengelolaan dana koperasi.

Solusi terakhir adalah evaluasi implementasi dan pendampingan berkelanjutan. Evaluasi dilakukan untuk menilai tingkat pemahaman peserta, efektivitas penerapan SOP, serta kemampuan pengurus dalam mengimplementasikan sistem pelaporan keuangan yang telah disusun. Hasil evaluasi menjadi dasar dalam merumuskan rekomendasi perbaikan dan rencana pendampingan lanjutan agar hasil kegiatan dapat diterapkan secara berkelanjutan.

Tabel 2. Permasalahan Mitra dan Solusi yang Ditawarkan

No.	Permasalahan Mitra	Solusi yang Ditawarkan	Luaran
1	Belum tersedia SOP pengelolaan keuangan	Pendampingan penyusunan SOP penerimaan kas, pengeluaran kas, pencatatan transaksi, dan pelaporan keuangan	Dokumen SOP pengelolaan keuangan
2	Pencatatan transaksi belum terstandarisasi	Penyusunan format pembukuan dan pencatatan transaksi	Format administrasi dan pembukuan koperasi
3	Pemahaman pengurus mengenai tata kelola masih terbatas	Pelatihan <i>Good Cooperative Governance</i> dan transparansi keuangan	Peningkatan kompetensi pengurus
4	Laporan keuangan belum sistematis	Pendampingan penyusunan format laporan keuangan	Format laporan keuangan yang lebih terstruktur
5	Pengendalian internal belum optimal	Pendampingan pembagian fungsi administrasi dan mekanisme pengawasan	Penguatan sistem pengendalian internal
6	Belum ada evaluasi implementasi	Monitoring dan evaluasi penerapan hasil pendampingan	Rekomendasi tindak lanjut dan perbaikan

Hasil dan Pembahasan

Persiapan dan Koordinasi Kegiatan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat diawali dengan koordinasi antara tim pelaksana dengan pengurus Koperasi Merah Putih di Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe. Koordinasi bertujuan untuk menyepakati jadwal pelaksanaan, menentukan peserta yang akan mengikuti kegiatan, serta mengidentifikasi kebutuhan utama yang akan menjadi fokus pendampingan. Pada tahap ini juga dilakukan peninjauan terhadap dokumen administrasi koperasi sebagai bahan awal dalam menyusun materi pelatihan dan pendampingan.

Hasil koordinasi menunjukkan bahwa pengurus memiliki komitmen yang tinggi untuk memperbaiki sistem tata kelola organisasi, khususnya pada aspek administrasi dan pengelolaan keuangan. Komitmen tersebut menjadi modal penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan pengabdian karena seluruh pengurus bersedia mengikuti setiap tahapan pelatihan dan pendampingan secara aktif.

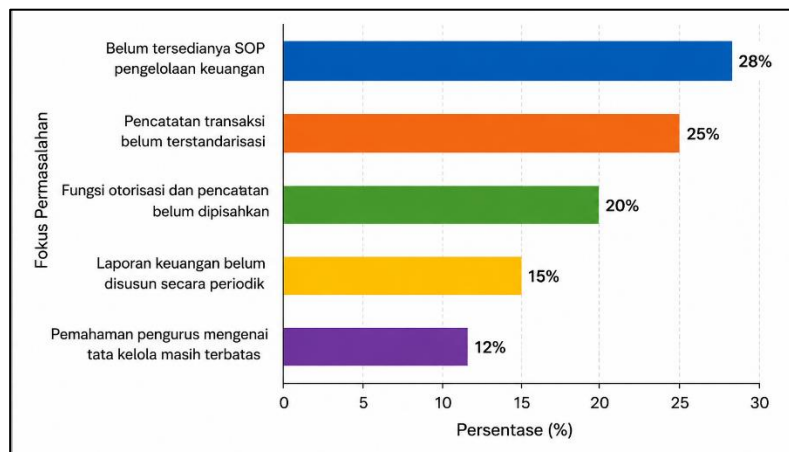
Identifikasi Permasalahan Mitra

Observasi awal dilakukan melalui wawancara, pengamatan langsung terhadap proses administrasi, serta telaah terhadap dokumen koperasi. Berdasarkan hasil identifikasi, ditemukan beberapa permasalahan yang berkaitan dengan tata kelola organisasi dan pengelolaan keuangan.

Tabel 3. Hasil Identifikasi Permasalahan Mitra

No.	Permasalahan	Dampak
1	SOP pengelolaan keuangan belum tersedia	Proses administrasi belum memiliki pedoman yang baku
2	Pencatatan transaksi belum terstandarisasi	Risiko kesalahan pencatatan lebih tinggi
3	Fungsi otorisasi dan pencatatan belum dipisahkan	Pengendalian internal belum optimal
4	Laporan keuangan belum disusun secara periodik	Informasi keuangan kurang transparan
5	Pemahaman pengurus mengenai tata kelola masih terbatas	Pengelolaan koperasi belum berjalan secara optimal

Hasil identifikasi menunjukkan bahwa sebagian besar permasalahan bersumber dari belum tersedianya sistem administrasi yang terstruktur. Kondisi ini menyebabkan proses pengelolaan keuangan masih bergantung pada kebiasaan kerja masing-masing pengurus sehingga belum terdapat standar operasional yang dapat dijadikan acuan bersama.



Gambar 1. Grafik Fokus Permasalahan UMKM Sebelum Pelatihan

Pelaksanaan Pelatihan dan Pendampingan

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui kombinasi penyampaian materi, diskusi interaktif, praktik penyusunan SOP, serta pendampingan penyusunan format pelaporan keuangan. Materi yang diberikan meliputi konsep *Good Cooperative Governance*, transparansi keuangan, sistem pengendalian internal, penyusunan SOP, dan teknik penyusunan laporan keuangan sederhana.

Selama pelaksanaan kegiatan, peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi. Diskusi berlangsung secara aktif karena sebagian besar peserta mengaitkan materi yang diberikan dengan permasalahan yang mereka hadapi dalam pengelolaan koperasi sehari-hari. Pendekatan partisipatif yang digunakan memungkinkan peserta tidak hanya memahami konsep secara teoritis, tetapi juga langsung mempraktikkan penyusunan dokumen tata kelola yang sesuai dengan kebutuhan koperasi.

Hasil Pendampingan

Pendampingan menghasilkan beberapa luaran yang dapat langsung dimanfaatkan oleh Koperasi Merah Putih sebagai pedoman operasional. Luaran tersebut meliputi penyusunan SOP pengelolaan keuangan, format pencatatan transaksi, serta format laporan keuangan yang lebih sistematis.

Tabel 4. Luaran Pendampingan

Luaran	Keterangan
SOP penerimaan kas	Tersusun
SOP pengeluaran kas	Tersusun
SOP pencatatan transaksi	Tersusun
Format laporan keuangan	Tersusun
Format administrasi keuangan	Tersusun

Selain menghasilkan dokumen tata kelola, pendampingan juga meningkatkan kemampuan peserta dalam memahami alur administrasi dan mekanisme pelaporan keuangan yang sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

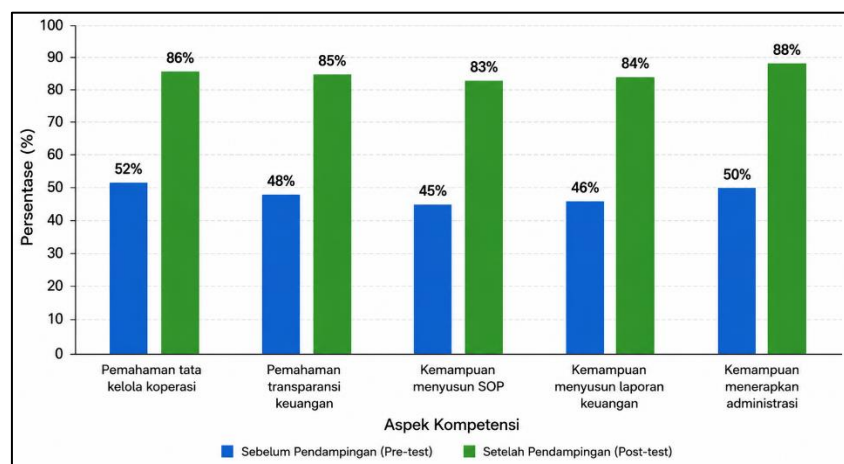
Evaluasi Kegiatan

Evaluasi dilakukan melalui pre-test dan post-test, observasi selama pendampingan, serta penilaian terhadap dokumen yang berhasil disusun peserta. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai tata kelola koperasi, penyusunan SOP, serta pelaporan keuangan.

Tabel 5. Hasil Evaluasi Kegiatan

Aspek Evaluasi	Hasil
Pemahaman tata kelola koperasi	Meningkat
Pemahaman transparansi keuangan	Meningkat
Kemampuan menyusun SOP	Meningkat
Kemampuan menyusun laporan keuangan	Meningkat
Kemampuan menerapkan administrasi	Meningkat

Hasil tersebut menunjukkan bahwa metode pelatihan yang dipadukan dengan pendampingan praktik memberikan pengalaman belajar yang lebih aplikatif. Peserta tidak hanya memahami materi secara konseptual, tetapi juga mampu mengimplementasikan hasil pembelajaran dalam penyusunan dokumen tata kelola koperasi.



Gambar 2. Grafik Perubahan Kompetensi Peserta Setelah Pendampingan

Pembahasan

Kegiatan pendampingan menunjukkan bahwa permasalahan utama yang dihadapi Koperasi Merah Putih bukan hanya berkaitan dengan keterbatasan administrasi, tetapi juga belum tersedianya sistem tata kelola yang mampu menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan operasional. Penyusunan SOP memberikan kepastian prosedur bagi pengurus dalam melaksanakan tugas, memperjelas pembagian tanggung jawab, serta memperkuat mekanisme pengendalian internal. Keberadaan SOP juga mendukung penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas karena setiap proses administrasi dan pengelolaan keuangan dilakukan berdasarkan prosedur yang terdokumentasi.

Pendampingan penyusunan format pelaporan keuangan memberikan manfaat praktis bagi pengurus dalam menyajikan informasi keuangan secara lebih sistematis. Dengan tersedianya format pencatatan transaksi dan laporan keuangan yang terstruktur, pengurus memiliki acuan yang lebih jelas dalam mendokumentasikan setiap transaksi sehingga kualitas informasi keuangan menjadi lebih baik. Kondisi ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan anggota terhadap pengelolaan koperasi sekaligus mendukung proses pengambilan keputusan organisasi.

Pendekatan partisipatif yang diterapkan selama kegiatan juga memberikan kontribusi terhadap peningkatan pemahaman peserta. Keterlibatan aktif pengurus dalam proses identifikasi masalah, penyusunan SOP, dan praktik penyusunan laporan keuangan menjadikan proses pembelajaran lebih kontekstual dan mudah diterapkan sesuai dengan kebutuhan koperasi. Dengan demikian, kegiatan pengabdian tidak hanya menghasilkan peningkatan pengetahuan, tetapi juga menghasilkan perangkat tata kelola yang dapat digunakan sebagai pedoman operasional dalam pengelolaan Koperasi Merah Putih.

Kesimpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan pada Koperasi Merah Putih di Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe telah memberikan kontribusi dalam penguatan tata kelola organisasi dan transparansi pengelolaan keuangan koperasi. Melalui rangkaian kegiatan observasi, pelatihan, pendampingan, dan evaluasi, pengurus memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai prinsip *Good Cooperative Governance*, pentingnya transparansi dan akuntabilitas, serta penerapan sistem pengendalian internal dalam pengelolaan koperasi.

Luaran utama kegiatan berupa tersusunnya Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan keuangan, format pencatatan transaksi, serta format pelaporan keuangan yang lebih sistematis dan mudah diterapkan. Dokumen tersebut diharapkan menjadi pedoman operasional yang mampu meningkatkan konsistensi pelaksanaan administrasi, memperjelas pembagian tugas, serta mendukung penyajian informasi keuangan yang lebih transparan dan akuntabel.

Selain menghasilkan perangkat tata kelola, kegiatan ini juga meningkatkan kapasitas pengurus dalam menyusun dan mengimplementasikan administrasi keuangan koperasi. Pendekatan pelatihan yang dipadukan dengan pendampingan praktik terbukti membantu peserta memahami materi secara lebih aplikatif sehingga hasil kegiatan dapat langsung diimplementasikan dalam pengelolaan koperasi sehari-hari.

Ke depan, diperlukan pendampingan lanjutan untuk mengawal implementasi SOP, penyempurnaan sistem administrasi, serta pemanfaatan aplikasi pencatatan keuangan berbasis digital agar tata kelola Koperasi Merah Putih semakin efektif, transparan, dan berkelanjutan.

Referensi

- Anjali, R., & Riofita, H. (2026). Peran Koperasi Merah Putih Dalam Sistem Ekonomi Nasional Indonesia. *Jurnal Pendidikan Vokasi Raflesia*, 6(1), 80–89.
- Apriansyah, R., Hasibuan, A., Fahmi, B. L., Munawaroh, N. L., Silvia, S., Nurfadila, N., Nate, T. T., Sayuti, M., & Mursalin, M. (2023). Sosialisasi Pemberdayaan kaum Perempuan Sebagai Upaya Penghasilan Tambahan dari Hasil Panen Nelayan di Bantayan, Kecamatan Seunuddon, Kabupaten Aceh Utara. *Jurnal Solusi Masyarakat Dikara*, 3(1), 39–43.
- Azzahara, A. (2025). Efektivitas Struktur Organisasi Koperasi dalam Meningkatkan Tata Kelola: Analisis Literatur Review PRISMA. *Jurnal Ekonomis*, 18(1), 47–70.

- Chandra, D. (2019). *Tata kelola koperasi yang baik dalam meningkatkan kinerja organisasi koperasi*. Deepublish.
- Ferona, N., Hasibuan, A., Maghfirah, R., Syatriawan, A., Walidi, M. F., Jannah, M., Idaryani, I., & Junita, N. (2024). Sosialisasi Program Candu Diksi (Cerita Daerahku Berbasis Augmented Reality 3D) sebagai Sarana Peningkatan Krisis Kearifan Lokal di MTs Nisam. *Jurnal Solusi Masyarakat Dikara*, 4(2), 71-75.
- Goo, E. E. K., & Sanda, E. M. (2022). Analisis pelaksanaan tata kelola rencana strategis, akuntabilitas dan transparansi dana desa terhadap pengelolaan keuangan desa (Studi di Desa Magepanda Kecamatan Magepanda). *Accounting UNIPA-Jurnal Akuntansi*, 1(1).
- Hasibuan, A., Ardan, M. A., Rosyada, A., Azzahro, H. H., Amalia, S., Putri, M. M., Sayuti, M., Siregar, W. V., & others. (2023). Sosialisasi Pengolahan Sampah Rumah Tangga Sebagai Upaya Membangun Kesadaran Kebersihan di Pantai Wisata Bantayan, Kecamatan Seunuddon, Kabupaten Aceh Utara. *Mejuajua: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 2(3), 1-6.
- Hasibuan, A., Sayuti, M., Fithra, H., Siregar, W. V., Mariyudi, M., Puspasari, C., Hasibuan, M. R. F., Fadhilati, N. I., & Al Farizi, R. (2023). Sosialisasi Penanganan Dini Kebakaran Pada Sekolah Di Lhokseumawe-Aceh Utara. *Jurnal Solusi Masyarakat Dikara*, 3(2), 95-99.
- Hasibuan, A., Siregar, W. V., Candrasari, R., Andiko, B., Wijaya, R. S., Andeska, N., Rozak, A., & Sucipto, F. D. (2024). Sosialisasi Penguatan Pemahaman Kampus Merdeka dalam Menyambut Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. *Jurnal Solusi Masyarakat Dikara*, 4(2), 67-70.
- Hasibuan, A., Siregar, W. V., Sukarwoto, S., & Cahyadi, C. I. (2024). Sosialisasi Pengembangan Akademik Berbasis Kemitraan Industri dan Riset di Politeknik Penerbangan Medan. *Jurnal Solusi Masyarakat Dikara*, 4(1), 17-21.
- Hasibuan, A., Verawaty Siregar, W., Candrasari, R., Andiko, B., Sastra Wijaya, R., Rozak, A., & Desti Sucipto, F. (2024). Sosialisasi Program Kreatifitas Mahasiswa dalam Meningkatkan Kualitas Mahasiswa Institut Seni Budaya Indonesia Aceh. *Mejuajua: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 4(1), 30-34. <https://doi.org/10.52622/mejuajuaabdinas.v4i1.139>
- Indonesia, I. A. (2024). Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP). *Ikatan Akuntan Indonesia*.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (2025).
- Muharram, A. I., & others. (2023). Pengaruh transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan koperasi terhadap tingkat kepercayaan anggota koperasi. *Jurnal Economina*, 2(12), 3787-3797.
- Mulyadi. (2019). *Sistem Akuntansi (Edisi ke-6)*.
- Peraturan Menteri Koperasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pengembangan Usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (2025).
- Putri, P. I. A. (2025). *Analisis Standard Operating Procedure pada Koperasi Simpan Pinjam Vija Sukma di Denpasar*. Politeknik Negeri Bali.
- Putri, R., Asran, A., Hasibuan, A., Akrtika, K., Faisal, F., & Saifannur, S. (2022). Sosialisasi Peningkatan Kualitas Produktivitas Panen Udang Melalui Pemberian Pakan Udang Secara Otomatis di Meunasah Aron. *J. SOLMA*, 11(3), 564-571.
- Syahban, W., Marzuki, S. N., & Buhasyim, M. A. (2025). Penerapan Good Corporate Governance dalam Meningkatkan Loyalitas Anggota Koperasi PKK Desa Pattiro Bajo. *Journal Social Society Vol*, 5(1).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian (1992).